

## MATERI KULIAH

**Mata Kuliah : Filsafat Administrasi Pendidikan**  
**Jumlah SKS : 2 ( dua ) Sks**  
**Kode MataKuliah : Ap 301**  
**Pengampu : Prof. Dr. H. Dadang Suhardan, M.Pd.**  
**Nugraha Suharto, M. Pd.**

### MATERI SAJIAN PERKULIAHAN KE : P4 – P6

#### 4.Pengertian Ilmu

Terminologi ilmu dari sudut pandang bahasa terutama Inggris adalah Science dalam bahasa Indonesia disebut Ilmu. Kata science dalam bahasa Inggris bermula dari bahasa Latin yaitu scire yang berarti belajar atau mengetahui. Dalam bahasa Arab kata Ilmu berasal dari kata alima. Pengetahuan yang mendalam, pengetahuan tentang hakekat segala sesuatu yang difahami dengan yakin dan gamblang. Ilmu ini bertolak dari pengalaman empiris sebagai proses penggaliannya. Pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut know ledge. Dalam bahasa Indonesia sering tidak dibedakan antara pengetahuan kata ilmu dan pengetahuan dan menjadi satu arti menjadi Ilmu Pengetahuan. (Muhammad TH, 1984:38)

**Ilmu adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah yang disebut “deducto – hipotetiko – verifikatif”, atau logico-hipotetico-verifikatif.** (Yuyun Suriasumantri, 1996)

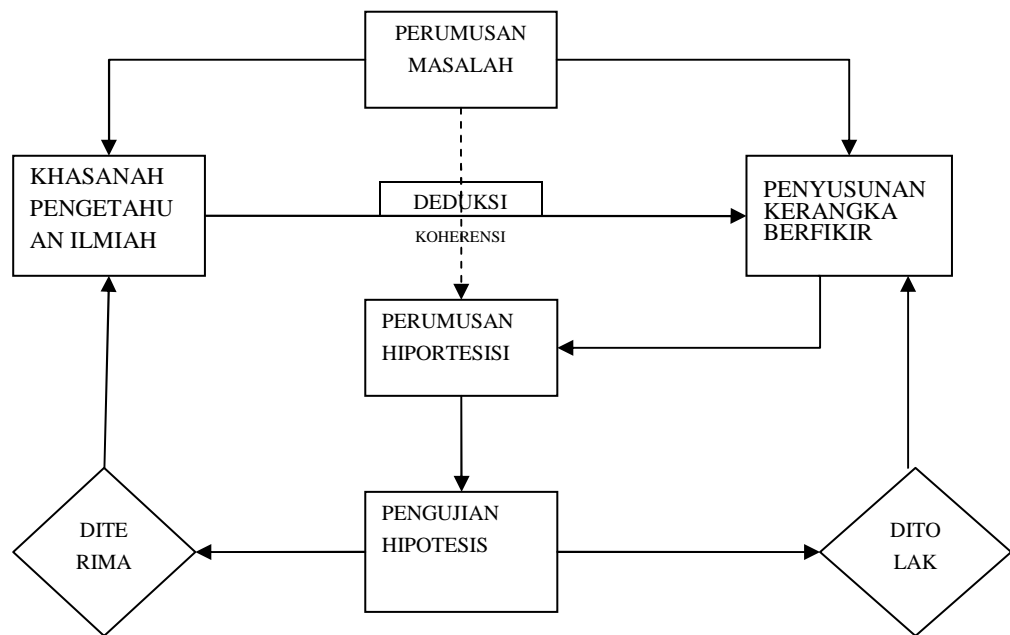
Ilmu dimulai dari adanya masalah, ilmu terbentuk karena manusia dihadapkan kepada masalah, kemudian dicari penjelasannya secara rinci dan terurai. Ilmu merupakan suatu penjelasan yang rasional yang sesuai dengan obyeknya. Penjelasan yang sesuai artinya didukung oleh fakta empirik sebagai suatu kenyataan, sehingga dinyatakan benar karena rasional dan sesuai dengan kenyataan apa adanya.

Sebelum mengalami pengujian secara empirik, walaupun sudah dijelaskan secara rasional status ilmu itu baru bersifat *hipotetis*. Atau penjelasan sementara. Hipotesis sangat berguna untuk memberi penjelasan awal, dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, karena hipotetis berguna sebagai pembimbing pemandu jalan kearah studi yang diinginkan. Ia baru memberi penjelasan sementara atau pendahuluan, yang sesungguhnya atau yang lebih lengkap baru diketahui setelah diteliti dengan pembuktian pakta dalam kenyataan. Untuk membuat hipotetis biasanya kita memanfaatkan temuan atau pengalaman sebelumnya sebagai pedoman. Mengurai kejadian yang telah ditemukan sebelumnya, kedalam premis. Premis artinya pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya, hasil dari penelitian atau pembuktian yang pernah dilakukan sehingga tidak lagi perlu dibuktikan, kegiatannya disebut *deduksi*.

Proses mengumpulkan fakta-fakta empirik untuk menentukan benar tidaknya, sesuai tidaknya dengan kenyataan disebut *verifikasi* yaitu proses pemeriksaan atau pengujian tentang kebenaran dari cara-cara pengolahan yang dipergunakan, atau pembuktian dengan alat uji yang standar, misalnya pada proses perhitungan, penelitian. Apakah benar cara menghitungnya, apakah benar cara melakukan penelitiannya. Apakah teknik perhitungan atau teknik penelitiannya sudah benar.

Proses berfikir ilmiah secara logico-hypotetico-verivikatif (Yuyun S 1996 : 128-129), sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah
2. Penyusunan kerangka berfikir dalam pengajuan hipotesis (studi pustaka dan dokumentasi ilmiah)
3. Perumusan hipotesis
4. Menguji hipotesis, untuk ini diperlukan data dan informasi empirik yang relevan). Proses dan cara-cara mengujijinya harus valis dan sah disebut verivikasi data.
5. Proses menerima atau menolak kesimpulan, apakah hipotesis diterima atau ditolak.



## 5. PENDIDIKAN

Pendidikan ada sejak pertama manusia mengenal komunikasi, sebab pendidikan tak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Hal ini bisa dipahami sebab sejak semula, pendidikan beriringan dengan kepercayaan. Kepercayaan terhadap sifat-sifat hakiki kemanusiaan sendiri, dan kepercayaan terhadap ada atau tidak adanya daya ruhaniah yang lebih besar dibanding kekuatan manusia, yang memayungi jagat seisinya.

Pendidikan pada masa “Sophistic” di Yunani dilakukan oleh para guru yang selalu berkeliling mengajar ditempat-tempat umum yang dipanggil dengan nama “Sofis”. Dalam bahasa Yunani ada kata “sophisma” yang berarti “akal cerdas”, “ketrampilan berargumen” dengan konotasi “licik” yang dipakai di dalam perdebatan atau pengajaran dengan satu tujuan yaitu agar keluar sebagai seorang pemenang. Kaum Sofis ini berpendapat bahwa pendidikan yang diperlukan adalah retorika, tata bahasa, logika, hukum, matematika, sastra, dan politik yang di dalam prakteknya kaum Sofis ini “terjebak” ke dalam permainan lambang dan simbol semata dalam bentuk permainan kata, ber-”silat-lidah”, menyusun argumentasi yang bersifat manipulatif melalui pemutar-balikan fakta, memanipulasi lambang

dan makna yang disampaikan pada para pendengarnya yang menurut Yasraf A. Piliang mereka terjebak di dalam dunia citra (image), dunia lambang yang berbeda dari realitas yang ada, berbeda dari kebenaran itu sendiri. Sehingga kebebasan yang diharapkan ada di dalam proses pendidikan secara tidak langsung sudah mengalami apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai “kekerasan simbolik” yaitu kekerasan yang halus dan tak tampak, baik dari sisi struktur bahasa maupun ditingkat semantik yang mengakibatkan di dalam proses pendidikan kaum Sofis yang ada sebenarnya adalah kebebasan semu.

Socrates menganggap bahwa pendidikan yang tidak mengajarkan pada murid untuk mencari kebenaran atau mengajarkan kebenaran tidaklah termasuk pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Untuk mencapai kebenaran melalui pendidikan itulah, Socrates menggunakan metoda dialektika yang membebaskan murid untuk berpikir sendiri tanpa terpengaruh oleh gagasan gurunya.

Senada dengan Socrates, Plato (427-347 SM) melalui karyanya yang berjudul “Republica” juga menggunakan metoda dialektika ini untuk memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk berpikir sendiri tentang musik, tentang pernikahan, tentang pemerintahan, tentang perundang-undangan dan yang lainnya.

Meski kebebasan di dalam pendidikan diakui perlunya sejak awal adanya pendidikan, tetapi di dalam perjalanan sejarah yang ada, cukup banyak paradigma-paradigma yang meminimalkan kebebasan di dalam pendidikan. Selain di masa Shopistic kebebasan menjadi minim sebab adanya “kekerasan simbolik” yang dilakukan, dimasa-masa selanjutnya masih juga terjadi reduksi kebebasan dalam pendidikan. Seiring dengan masa Yunani Sophistic, berkembang pula pendidikan di Romawi yang meminimalkan kebebasan melalui penekanan disiplin, organisasi dan ketrampilan militer.

Santo Benediktus dari Nursia (480-550 M) mendirikan ordonya di Monte Cassino, Italia, dengan dekrit ketat yang meminimalkan kebebasan dalam pendidikannya. Pendidikan yang dilakukan mewajibkan setiap biarawan membaca kitab-kitab suci sekurang-kurangnya dua jam perhari, dan tidak memperkenankan membaca buku-buku lain, tidak membolehkan para biarawan itu memiliki pena untuk menulis sendiri. Setelah masa itu dilanjutkan dengan monopoli Gereja atas pendidikan formal di seluruh Eropa yang berlangsung seribu tahun, kebebasan di

dalam pendidikan diminimkan lagi sebagai pelaksanaan pendidikan atas doktrin Gereja (kaum Skolastik). Kebebasan berpikir ditekan, kebebasan berbeda pendapat diberangus yang sampai memakan korban seperti Galileo yang harus kehilangan nyawanya akibat berbeda pendapat dengan pihak gereja akan pengetahuan ilmu alam. Berbagai perguruan pendidikan yang bertebaran sampai abad ke 16 masih dilandasi niat untuk memasok calon-calon pendeta dan mendidik kaum ningrat yang kawasan rohaniannya dikendalikan oleh pejabat gereja.

William F. O'neil berpendapat bahwa pendidikan yang meminimalkan kebebasan itu disebut sebagai pendidikan yang konservatif. O'neil membaginya menjadi tiga bagian yaitu pendidikan fundamental, pendidikan intelektual dan pendidikan konservatif. Lebih lanjut O'neil menjelaskan tentang Fundamentalisme pendidikan sebagai berikut : "...pada dasarnya anti-intelektual dalam arti bahwa mereka ingin meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap Kebenaran yang diwahyukan atau konsensus sosial yang sudah mapan..." Adapun Intelektualisme pendidikan: "...pada dasarnya otoritarian...demi menyesuaikan secara lebih sempurna dengan cita-cita intelektual atau rohaniyah yang sudah mapan dan tidak bervariasi..." Konservatisme pendidikan adalah: "Konservatisme pada dasarnya adalah posisi yang mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu (sudah cukup tua atau dan mapan), didampingi dengan rasa hormat mendalam terhadap hukum dan tatanan, sebagai landasan perubahan sosial yang konstruktif" Pendidikan yang konservatif beranggapan bahwa sasaran utama sekolah adalah pelestarian dan penerusan pola sosial serta tradisi-tradisi yang sudah mapan.

Pada abad ke 17, muncul kembali pemikiran-pemikiran yang mengedepankan kebebasan di dalam pendidikan di Eropa yang diawali dengan kebebasan dalam pendidikan berdasar kepada paradigma *liberal arts* klasik. "Liberasionisme adalah sebuah sudut pandang yang menganggap bahwa kita musti segera melakukan perombakan berlingkup besar terhadap tatanan politik (dan pendidikan) yang ada sekarang, sebagai cara untuk memajukan kebebasan-

kebebasan individu dan mempromosikan perwujudan potensi-potensi diri semaksimal mungkin”

Bagi pendidik liberationis, sekolah bersifat obyektif namun tidak sentral dan sekolah bukan hanya mengajarkan pada siswa bagaimana berpikir yang efektif secara rasional dan ilmiah, melainkan juga mengajak siswa untuk memahami kebijaksanaan tertinggi yang ada di dalam pemecahan-pemecahan masalah secara intelek yang paling meyakinkan. Dengan kata lain, liberationisme pendidikan dilandasi oleh sebuah sistem kebenaran yang terbuka. Secara moral, sekolah berkewajiban mengenalkan dan mempromosikan program-program sosial konstruktif dan bukan hanya melatih pikiran siswa. Sekolahpun harus memajukan pola tindakan yang paling meyakinkan yang didukung oleh sebuah analisis obyektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles tentang prinsip pendidikan yaitu sebagai wahana pengkajian fakta-fakta, mencari “yang obyektif”, melalui pengamatan atas kenyataan.

Sumber: <http://www.mail-archive.com/filsafat@yahoogroups.com/msg01982.html>

## **6.FILSAFAT DAN SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA**

### **Filsafat Pendidikan**

Filsafat pendidikan dalam arti luas dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: (1) filsafat praktek pendidikan dan (2) filsafat ilmu pendidikan (Mudyahardjo, 2001). Filsafat praktek pendidikan adalah analisis kritis dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Filsafat praktek pendidikan dapat dibedakan menjadi: (a) filsafat proses pendidikan (biasanya hanya disebut filsafat pendidikan) dan (b) filsafat sosial pendidikan. Filsafat proses pendidikan adalah analisis kritis dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Filsafat proses pendidikan biasanya membahas tiga masalah pokok, yaitu: (1) apakah sebenarnya pendidikan itu, (2) apakah tujuan pendidikan itu sebenarnya, dan (3) dengan cara apakah tujuan pendidikan itu dapat dicapai (Henderson, 1959 *dalam* Mudyahardjo, 2001). Filsafat sosial pendidikan merupakan analisis kritis dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dalam mewujudkan tatanan manusia idaman. Filsafat sosial pendidikan, terkait dengan tiga masalah pokok, antara lain: (1) hakekat kesamaan pendidikan dan pendidikan, (2) hakekat kemerdekaan dan pendidikan, dan (3) hakekat demokrasi dan pendidikan.

Secara konseptual filsafat ilmu pendidikan didefinisikan sebagai analisis kritis komprehensif tentang pendidikan sebagai salah satu bentuk teori pendidikan yang dihasilkan melalui riset, baik kualitatif maupun kuantitatif. Objek filsafat ilmu pendidikan dapat dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

- (1) Ontologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakekat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan.
- (2) Epistemologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakekat objek formal dan material ilmu pendidikan.
- (3) Metodologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakekat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan, dan
- (4) Aksiologi ilmu pendidikan, membahas tentang hakekat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan.

Secara sederhana filsafat dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai-nilai (*systems of values*) yang luhur yang dapat menjadi pegangan atau anutan setiap individu, atau keluarga, atau kelompok komunitas dan/atau masyarakat tertentu, atau pada gilirannya bangsa dan negara tertentu. Pendidikan sebagai upaya terorganisasi, terencana, sistematis, untuk mentransmisikan kebudayaan dalam arti luas (ilmu pengetahuan, sikap, moral dan nilai-nilai hidup dan kehidupan, ketrampilan, dll.) dari suatu generasi ke generasi lain. Adapun visi, misi dan tujuannya yang ingin dicapai semuanya berlandaskan suatu filsafat tertentu. Bagi kita sebagai bangsa dalam suatu negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, pendidikan kita niscaya dilandasi oleh filsafat hidup yang kita sepakati dan anut bersama.

Dalam sejarah panjang kita sejak pembentukan kita sebagai bangsa (*nation*

*formation*) sampai kepada terbentuknya negara bangsa (*state formation* dan *nation state*) yang merdeka, pada setiap kurun zaman, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari filsafat yang menjadi fondasi utama dari setiap bentuk pendidikan karena menyangkut sistem nilai-nilai (*systems of values*) yang memberi warna dan menjadi "semangat zaman" (*zeitgeist*) yang dianut oleh setiap individu, keluarga, anggota-anggota komunitas atau masyarakat tertentu, atau pada gilirannya bangsa dan negara nasional. Landasan filsafat ini hanya dapat dirunut melalui kajian sejarah, khususnya Sejarah Pendidikan Indonesia.

Sebagai komparasi, di negara-negara Eropa (dan Amerika) pada abad ke-19 dan ke-20 perhatian kepada Sejarah Pendidikan telah muncul dari dan digunakan untuk maksud-maksud lebih lanjut yang bermacam-macam, a.l. untuk membangkitkan kesadaran berbangsa, kesadaran akan kesatuan kebudayaan, pengembangan profesional guru-guru, atau untuk kebanggaan terhadap lembaga-lembaga dan tipe-tipe pendidikan tertentu. (Silver, 1985: 2266).

Substansi dan tekanan dalam Sejarah Pendidikan itu bermacam-macam tergantung kepada maksud dari kajian itu: mulai dari tradisi pemikiran dan para pemikir besar dalam pendidikan, tradisi nasional, sistim pendidikan beserta komponen-komponennya, sampai kepada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial atau kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan (sains), ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial. Sehubungan dengan MI semua Sejarah Pendidikan erat kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial. (Silver, 1985: Talbot, 1972: 193-210)

Esensi dari pendidikan itu sendiri sebenarnya ialah pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide dan nilai-nilai spiritual serta (estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Oleh sebab itu sejarah dari pendidikan mempunyai sejarah yang sama tuanya dengan masyarakat pelakunya sendiri, sejak dari pendidikan informal dalam keluarga batih, sampai kepada pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat agraris maupun industri.

Selama ini Sejarah Pendidikan masih menggunakan pendekatan lama atau "tradisional" yang umumnya diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikir-pemikir besar dalam pendidikan, atau



sejarah dan sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. (Silver, 1985: 2266) Pendekatan yang umumnya diakronis ini dianggap statis, sempit serta terlalu melihat ke dalam. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam pendidikan beserta segala macam masalah yang timbul atau ditimbulkannya, penanganan serta pendekatan baru dalam Sejarah Pendidikan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak oleh para sejarawan pendidikan kemudian. (Talbot, 1972: 206-207)

Para sejarawan, khususnya sejarawan pendidikan melihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat; antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah sebagai representasi bangsa dan negara yang merumuskan kebijakan (*policy*) umum bagi pendidikan nasional. Produk dari pendidikan menimbulkan mobilitas sosial (vertikal maupun horizontal); masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif ataupun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat pemakai, misalnya, timbulnya golongan menengah yang menganggur karena jenis pendidikan tidak sesuai dengan pasar kerja; atau kesenjangan dalam pemerataan dan mutu pendidikan; pendidikan lanjutan yang hanya dapat dinikmati oleh anak-anak orang kaya dengan pendidikan terminal dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu; komersialisasi pendidikan dalam bentuk yayasan-yayasan dan sebagainya. Semuanya menuntut peningkatan metodologis penelitian dan penulisan sejarah yang lebih baik daripada sebelumnya untuk menangani semua masalah kependidikan ini.

Sehubungan dengan di atas pendekatan Sejarah Pendidikan baru tidak cukup dengan cara-cara diakronis saja. Perlu ada pendekatan metodologis yang baru yaitu a.l, interdisiplin. Dalam pendekatan interdisiplin dilakukan kombinasi pendekatan diakronis sejarah dengan sinkronis ilmu-ilmu sosial. Sekarang ini ilmu-ilmu sosial tertentu seperti antropologi, sosiologi, dan politik telah memasuki "perbatasan" (sejarah) pendidikan dengan "ilmu-ilmu terapan" yang disebut antropologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan politik pendidikan. Dalam pendekatan ini dimanfaatkan secara optimal dan maksimal

hubungan dialogis "simbiose mutualistis" antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial.

Sejarah Pendidikan Indonesia dalam arti nasional termasuk relatif baru. Pada zaman pemerintahan kolonial telah juga menjadi perhatian yang diajarkan secara diakronis sejak dari sistem-sistem pendidikan zaman Hindu, Islam, Portugis, VOC, pemerintahan Hindia-Belanda abad ke-19. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan zaman Jepang dan setelah Indonesia merdeka model diakronis ini masih terus dilanjutkan sampai sekarang.